



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
/BASARNAS)

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 31 Maret 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.00 WIB s.d 13.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Membahas dan menetapkan refocusing program/kegiatan Unit Kerja Eselon I TA 2021; 2. Lain-lain.
Ketua Rapat	: Ir. Ridwan Bae
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: Orang Anggota dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Dirjen Perumahan, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kepala Badan P infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini adalah membahas dan menetapkan refocusing program/kegiatan Unit Kerja Eselon I TA 2021.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Perumahan, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengenai *Refocusing* dan Realokasi Anggaran TA. 2021 masing-masing unit di Ditjen Perumahan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan BPIW Kementerian PUPR sebagai berikut:

(dalam ribu rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu APBN TA. 2021	Penghematan / <i>Refocusing</i>	Pagu APBN TA. 2021 Setelah Penghematan	Percepatan Penarikan PHLN	Pagu APBN TA. 2021 Setelah Revisi
		A	B	A-B	C	(A-B)+C
1.	Ditjen Perumahan	8.093.921.257	784.950.287	7.308.970.970	27.060.000	7.336.030.970
2.	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	273.775.018	41.451.644	232.323.374	-	232.323.374
3.	BPIW	206.177.709	57.285.780	148.891.929	-	148.891.929

2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perumahan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan BPIW agar tetap memperhatikan capaian output kegiatan prioritas nasional TA. 2021 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Ditjen Perumahan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan BPIW atas pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai, utamanya BSPS, yang berjalan dengan baik. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perumahan agar dapat mengupayakan penambahan kuota BSPS, menyederhanakan petunjuk teknis pelaksanaan dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat penerima BSPS.
4. Komisi V DPR RI mendorong Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan agar melakukan terobosan dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, misalnya melalui skema KPBU dan melibatkan koperasi yang telah memiliki asset besar.
5. Komisi V DPR RI meminta BPIW untuk meningkatkan koordinasi dengan K/L dan instansi terkait lainnya dalam rangka mendukung terpadunya pengembangan wilayah dengan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB.

Jakarta, 31 Maret 2021

KETUA RAPAT,



RIDWAN BAE

DIRJEN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PUPR,

EKO D. HERIPOERWANTO

KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PUPR,

HADI SUCAHYONO

DIRJEN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PUPR,



KHALAWI ABDUL HAMID